

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Azhari, M. (2021). *Hukum Penanggulangan Bencana di Indonesia: Perspektif Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- BNPB. (2023). *Manajemen Risiko Bencana Terpadu di Indonesia*. Jakarta: Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan.
- Djalil, M. (2020). *Pengelolaan Bencana dan Ketahanan Nasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Fajar, Mukti, & Yulianto, Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Handayani, I. G. A. K., & Wicaksono, D. (2022). *Hukum Pemerintahan Daerah dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Haryanto, S. (2024). *Hukum Administrasi Pemerintahan dalam Era Desentralisasi*. Semarang: UNDIP Press.
- Ismail, F., & Mulyadi, D. (2021). *Governance dan Manajemen Penanggulangan Bencana di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Kementerian Dalam Negeri. (2022). *Panduan Teknis Penyelenggaraan BPBD Daerah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.
- Kusuma, A. P. (2023). *Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi di Indonesia*. Malang: UB Press.
- Lestari, R., & Santoso, A. (2024). *Kebijakan Publik dan Manajemen Krisis Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum: Pendekatan Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana Prenada Media Group.
- Nugroho, H. (2022). *Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Indonesia*.

Jakarta: Rajawali Pers.

Puspitasari, D. (2023). *Manajemen Darurat dan Rehabilitasi Pascabencana*.

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Rachman, F., & Suprpto, T. (2020). *Asas dan Prinsip Penyelenggaraan*

Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Rifa'i, I. J. (2023). Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum. *Metodologi*

Penelitian Hukum, 6.

Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu*

Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif,

kualitatif dan R&D.

Sunarno, Siswanto. (2008). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta:

Sinar Grafika.

Suryani, N. (2025). *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Mitigasi Bencana Alam*.

Bandung: Mandar Maju.

Wibowo, A. (2023). *Penerapan Sistem Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan*

Bencana. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

JURNAL

Marfai, M. A. (2003). *GIS Modelling of river and tidal flood hazards in a*

waterfront city. Case Study: Semarang City, Central Java, Indonesia

Permatasari, I. S., Nurcahyanto, H., & Musawa, M. (2012). *Strategi penanganan*

kebencanaan di Kabupaten Semarang (studi banjir dan rob). *Journal of*

Public Policy and Management Review, 1(1), 191-200.

Pratami, B. D., Larasati, R., Intan, S. R. R., & Kamalludin, I. (2021). *Status*

hukum tanah musnah berdasarkan Permen ATR/BPN No. 17 Tahun 2021.

Officium Notarium, 1(2), 218-229.

- Ramadhan, I., & Matondang, A. (2016). *Peran badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Medan dalam penanggulangan bencana alam*. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA), 4(2), 173-181.
- Salim, M. A. (2018). *Penanganan banjir dan rob di wilayah Pekalongan*. Jurnal Teknik Sipil, 11, 15-23

SUMBER INTERNET

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Data dan Informasi Kejadian Bencana Indonesia Tahun 2024.” *bnpb.go.id*. <https://bnpb.go.id/>.
2. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). “Peringatan Dini Cuaca Ekstrem dan Potensi Banjir Rob di Wilayah Pesisir Jawa Tengah.” *bmkg.go.id*. <https://www.bmkg.go.id/>.
3. Pemerintah Kabupaten Pekalongan. “Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pekalongan.” *pekalongankab.go.id*. <https://pekalongankab.go.id/>.
4. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. “Pedoman Penyelenggaraan BPBD Daerah dalam Penanggulangan Bencana.” *kemendagri.go.id*. <https://kemendagri.go.id/>.
5. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan. “Kabupaten Pekalongan dalam Angka 2024.” *bps.go.id*. <https://pekalongankab.bps.go.id/>.
6. DetikNews. “Longsor Pekalongan 2025: Akses Jalan Terputus dan Warga Mengungsi.” *detik.com*. <https://news.detik.com/>.

PERATURAN UNDANG UNDANG

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanggulangan Bencana.
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
12. Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana Daerah.
15. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.